

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2019

(AUDITED)

Jl. Majapahit No.58

Mataram - Nusa Tenggara Barat 83126

Telp. 0370-621876 Fax. 0370- 642074

e-mail : helpdeskpta.mataram@gmail.com



**LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Majapahit No.58

Telp. 0370-621876 Fax. 0370- 642074

Mataram - Nusa Tenggara Barat 83126

e-mail : helpdeskpta.mataram@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mataram, 17 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

MISNUDIN, S.H., M.H.
NIP.196412311994031046

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca.....	6
III. Laporan Operasional.....	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	12
V. Catatan atas Laporan Keuangan	14
A. Penjelasan Umum	14
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	38
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
Daftar dan Lampiran	48
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	49
Daftar Hibah Langsung.....	52
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	54

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Jl. Majapahit No.58 Mataram - Nusa Tenggara Barat 83126

Telp. 0370-621876 Fax. 0370- 642074 e-mail : helpdeskpta.mataram@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, 17 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

MISNUDIN, S.H., M.H.
NIP.196412311994031046

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.682.452 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.682.452 atau mencapai 63,64 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp10.500.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp15.160.782.531 atau mencapai 99,67 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp15.211.159.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp46.114.247.035 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp27.976.000; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp46.086.271.035 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp22.377.024 dan Rp46.091.870.011

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.728.302 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp15.982.414.168 sehingga terdapat Defisit dari

Kegiatan Operasional sebesar Rp-15.974.685.866, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp6.150 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-15.974.679.716.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 sebesar Rp46.900.232.791, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-15.974.679.716 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar -71.838.743 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 15.238.155.679 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp46.091.870.011.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 Dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2018			TA 2017
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	10.500.000	6.682.452	63,64	21.056.252
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		10.500.000	6.682.452	63,64	21.056.252
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	12.291.708.000	12.286.126.812	100,00	18.042.320.155
2.	Belanja Barang	B.2.2.	2.823.951.000	2.780.077.019	99,95	2.096.669.859
3.	Belanja Modal	B.2.3.	95.500.000	94.578.700	100,00	464.119.000
	Jumlah Belanja Negara		15.211.159.000	15.160.782.531	99,99	20.603.109.014

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
NERACA
PER 31 Desember 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	4.027.000	0
Piutang Bukan Pajak	C. 2.	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C. 3.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 4.	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C. 5.	0	0
Persediaan	C. 6.	23.949.000	15.787.150
Jumlah Aset Lancar		27.976.000	15.787.150
Aset Tetap			
Tanah	C. 7.	38.614.442.000	38.614.442.000
Peralatan dan Mesin	C. 8.	4.920.062.840	4.980.139.177
Gedung dan Bangunan	C. 9.	7.676.515.000	7.752.622.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 10.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C. 11.	127.598.485	127.598.485
Konstruksi dalam Pengerjaan	C. 12.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 13.	-5.252.347.290	-4.568.250.317
Jumlah Aset Tetap		46.086.271.035	46.906.551.345
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 14.	121.003.000	121.003.000
Aset Lain-Lain	C. 15.	238.710.637	0
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C. 16.	(359.713.637)	(121.003.000)

Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		46.114.247.035	46.922.338.495
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C. 17.	4.027.000	0
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 18.	17.478.357	20.188.037
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 19.	871.667	1.917.667
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		22.377.024	22.105.704
Jumlah Kewajiban		22.377.024	22.105.704
EKUITAS			
Ekuitas	C. 20.		
Jumlah Ekuitas		46.091.870.011	46.900.232.791
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		46.091.870.011	46.922.338.495

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	17.038.585	17.038.585
Jumlah Pendapatan		17.038.585	17.038.585
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	12.286.399.370	17.915.639.760
Beban Persediaan	D. 3	56.429.500	55.757.750
Beban Barang dan Jasa	D. 4	1.416.101.626	864.620.130
Beban Pemeliharaan	D. 5	652.416.050	697.642.068
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	643.991.755	605.312.757
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	927.075.867	709.397.288
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Jumlah Beban		15.982.414.168	20.848.369.753
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(15.974.685.866)	(20.831.331.168)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D. 11	0	2.100.000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6.150	121.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		6.150	2.221.000

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(15.974.679.716)	(20.829.110.168)
Pos Luar Biasa	D. 12	
Pendapatan PNBPN	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(15.974.679.716)	(20.829.110.168)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ekuitas Awal	E. 1	46.900.232.791	13.491.507.612
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(15.974.679.716)	(20.829.110.168)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E. 3	0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	(71.838.743)	33.946.438.512
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.3	(76.107.000)	33.946.438.512
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.4	4.268.257	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.5	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	15.238.155.679	20.291.396.835
Ekuitas Akhir		46.091.870.011	46.900.232.791

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada

Bagan Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempunyai visi "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram Yang Agung". Adapun penjelasan atas visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Tinggi Agama menunjukkan institusi yang berada dalam lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama khususnya;
- b. Mataram, menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan Tinggi Agama;
- c. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah:

- 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Mataram melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur pengadilan.
2. Melanjutkan cita-cita modernisasi pengadilan.
3. Meningkatnya Proses penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan biaya ringan.
4. Tertib administrasi perkara.
5. Mudahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan.
6. Pengawasan internal yang efektif dan efisien.
7. Putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan eksekutebel.
8. Pelaksanaan putusan/penetapan (eksekutebel) dan penyelesaian yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN

adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi

pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang

menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus

yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp21.056.25
2*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.682.452 atau mencapai 63,64 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp10.500.000. Pendapatan Pengadilan Tinggi Agama Mataram terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.682.452 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.500.000	6.682.452	63,64
3.	Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji	0	0	0
Total Pendapatan		10.500.000	6.682.452	63,64

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. (14.373.800) atau -68,26 persen dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan karena:

1. Tidak adanya permohonan uang muka gaji pegawai yang mutasi di TA 2019;
2. Tidak adanya aktivitas pemindahtanganan BMN di TA 2019;

Perbandingan realisasi PNBP TA 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2.100.000	(2.100.000)	-100,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Bangunan	6.682.302	12.785.972	(6.103.670)	-47,74
3.	Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji	0	6.170.280	(6.170.280)	-100,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	150	0	150	0,00
5.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0	0	0	0,00
Total Pendapatan		6.682.452	21.056.252	(14.373.800)	-68,26

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp
15.160.782.531*

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp15.160.782.531 atau 99,67 % dari anggaran belanja sebesar Rp.15.211.159.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2019		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	12.291.708.000	12.286.126.812	99,95
Belanja Barang	2.823.951.000	2.780.077.019	98,45
Belanja Modal	95.500.000	94.578.700	99,04
Total Belanja Netto	15.211.159.000	15.160.782.531	99,67

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp(5.151.670.556) atau sebesar (25,36) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena:

1. Penurunan aktivitas belanja pegawai, dimana banyak Hakim Tinggi yang mutasi ke Satuan Kerja lain.
2. Penurunan pagu belanja modal yang berimbas pada penurunan aktivitas belanja aset.

Perbandingan realisasi belanja TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 201	TA 2018	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	12.286.126.812	17.916.748.425	(5.630.621.613)	-31,43
Belanja Barang	2.780.077.019	2.223.204.662	556.872.357	25,05
Belanja Modal	94.578.700	172.500.000	(77.921.300)	-45,17
Total Belanja	15.160.782.531	20.312.453.087	(5.151.670.556)	-25,36

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
12.286.126.812*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp.12.286.126.812 dan Rp.17.916.748.425. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 mengalami penurunan sebesar 31,43 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain karena banyaknya pegawai yang mutasi khususnya Hakim Tinggi. Dengan berkurangnya pegawai, maka belanja gaji pokok PNS, Tunjangan Beras, dan Tunjangan Kemahalan juga menurun.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	%
Beban Gaji Pokok PNS	3.175.265.920	3.663.020.100	(13,32)
Beban Pembulatan Gaji PNS	46.355	51.871	(10,63)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	265.325.180	327.944.590	(19,09)
Beban Tunj. Anak PNS	66.197.436	70.139.990	(5,62)
Beban Tunj. Struktural PNS	94.360.000	94.410.000	(0,05)
Beban Tunj. Fungsional PNS	6.530.935.000	10.573.460.000	(38,23)
Beban Tunj. PPh PNS	1.316.374.512	2.109.781.719	(37,61)
Beban Tunj. Beras PNS	136.584.120	158.454.960	(13,80)
Beban Uang Makan PNS	430.522.000	509.151.000	(15,44)
Beban Tunjangan Umum PNS	49.120.000	48.720.000	0,82
Beban Tunjangan Kemahalan	221.400.000	361.800.000	(38,81)
Hakim			
Total Belanja Brutto	12.286.130.523	17.916.934.230	(31,43)
Pengembalian Belanja	(3.711)	(185.805)	(98,00)
Total Belanja Netto	12.286.126.812	17.916.748.425	(31,43)

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang: Rp
2.780.077.019*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp.2.780.077.019 dan Rp.2.223.204.662.

Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 25,05 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini disebabkan karena :

1. Adanya peningkatan aktivitas belanja barang operasional,
2. Kenaikan belanja sewa,
3. Meningkatnya aktivitas perjalanan dinas.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	%
Belanja Barang Operasional	786.554.243	690.073.872	13,98
Belanja Barang Non Operasional	10.800.000	44.994.942	(76,00)
Belanja Barang Persediaan	67.312.000	67.350.000	(0,06)
Belanja Jasa	621.729.621	126.318.023	392,19
Belanja Pemeliharaan	649.689.400	689.155.068	(5,73)
Belanja Perjalanan Dinas	643.991.755	605.312.757	6,39
Total Belanja Brutto	2.780.077.019	2.223.204.662	25,05
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	2.780.077.019	2.223.204.662	25,05

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja Modal
: Rp94.578.700*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp.94.578.700 dan Rp.172.500.000.

Realisasi Belanja Modal TA 2019 mengalami penurunan sebesar (45,17) persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2018. Hal ini disebabkan karena menurunnya pagu anggaran untuk pengadaan Peralatan dan Mesin dalam hal ini Alat Pengolah Data.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	94.578.700	172.500.000	(45,17)
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0
Total Belanja Brutto	94.578.700	172.500.000	(45,17)
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	94.578.700	172.500.000	(45,17)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp 27.976.000

Aset Lancar

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 4.027.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.4.027.000 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2019	31 Desember TA 2018
1	Uang tunai	4.027.000	0
Jumlah		4.027.000	0

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran sudah disetor pada tanggal 2 Januari 2020 dengan NTPN BB4E38N3D5OVMOAD.

C.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp0*

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

C.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp23.949.000*

Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp23.949.000 dan Rp.15.787.150. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Barang Konsumsi	23.520.000	13.013.500
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	429.000	2.773.650
Total		23.949.000	15.787.150

Persediaan senilai Rp23.949.000 seluruhnya berada dalam kondisi baik menurut berita acara pemeriksaan opname fisik persediaan tanggal 31 Desember 2019 nomor W22-A/1767.a/OT.01.2/XII/2019.

C.1. Aset Tetap

*Aset Tetap :
Rp
46.086.271.035*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 tersaji sebesar Rp46.086.271.035 dan Rp46.906.551.345. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan
1	Tanah	38.614.442.000	38.614.442.000	0
2	Peralatan dan Mesin	4.920.062.840	4.980.139.177	(60.076.337)
3	Gedung dan Bangunan	7.676.515.000	7.752.622.000	(76.107.000)
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	127.598.485	127.598.485	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	51.338.618.325	51.474.801.662	136.183.337
	Akumulasi Penyusutan	-5.252.347.290	-4.568.250.317	(684.096.973)
	Nilai Buku Aset Tetap	46.086.271.035	46.906.551.345	(820.280.310)

C.14. Tanah

Tanah: Rp
38.614.442.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.38.614.442.000 dan Rp.38.614.442.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	38.614.442.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2019	38.614.442.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku 31 Desember 2019	38.614.442.000

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Nilai
1	1	375	SHP.67	Pemerintah RI Cq MA	Rumah Dinas	1.307.352.911
2	2	1.068	SHP.04	Pemerintah RI Cq MA	Rumah Dinas	3.723.341.089
3	6	3.821	SHP.05	Pemerintah RI Cq MA	Gedung Kantor	33.583.748.000
	Jumlah					38.614.442.000

Saldo tanah yang tertuang dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 ini terdiri dari 1 (satu) Tanah Bangunan Kantor seluas 3.821 m² yang terletak di Jl. Majapahit dan 2 (dua) Tanah Bangunan Rumah Dinas masing-masing seluas 375 m² terletak di Jl. Majapahit dan 1.068 m² terletak di Jl. Swakarya. Tidak ada penambahan nilai Tanah selama Tahun Anggaran 2019.

C.15. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
4.920.062.840*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp4.920.062.840 dan Rp4.980.139.177.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	4.980.139.177
Mutasi Tambah	0
- Transfer masuk	84.055.600
- Pembelian	94.578.700
Mutasi Kurang	
- Reklasifikasi	238.710.637
Saldo per 31 Desember 2019	4.920.062.840
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	(4.246.684.270)
Nilai Buku 31 Desember 2019	673.378.570

Penambahan nilai peralatan dan mesin sampai dengan periode ini berasal dari Belanja Modal senilai Rp94.578.700 yang terdiri dari Alat Pengolah data berupa Laptop dan LCD Proyektor, dan juga berasal dari Transfer Masuk senilai Rp84.055.600 yang terdiri dari alat pengolah data berupa PC unit dan UPS. Sementara pengurangan nilainya berasal dari Reklasifikasi aset tetap menjadi aset yang tidak digunakan untuk operasional pemerintahan senilai Rp238.710.637 berupa alat pengolah data, meubelair, dan alat telekomunikasi dimana rincian dapat dilihat pada data pendukung laporan keuangan ini.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.16. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
7.676.515.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.7.676.515.000 dan Rp.7.752.622.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	7.752.622.000
Mutasi Tambah	
- Pemutakhiran Rekonsiliasi	82.360.000
Mutasi Kurang	
- Pemutakhiran Rekonsiliasi	158.467.000
Saldo per 31 Desember 2019	7.676.515.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	(1.005.663.020)
Nilai Buku 31 Desember 2019	6.670.851.980

Terjadi penurunan nilai Gedung dan Bangunan selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp76.107.000. Mutasi tambah nilai Gedung dan Bangunan berasal dari pemutakhiran rekonsiliasi senilai Rp82.360.000 berupa Lapangan olahraga. Sementara mutasi kurang berasal dari pemutakhiran rekonsiliasi senilai Rp158.467.000 berupa bangunan Gedung kantor dan rumah dinas.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.17. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp
0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.18. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya:
Rp127.598.485*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset

Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.127.598.485 dan Rp.127.598.485.

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.19. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp 5.252.347.290

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp5.252.347.290 dan Rp4.568.250.317.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Peralatan dan Mesin	4.920.062.840	-4.246.684.270	673.378.570
	Gedung dan Bangunan	7.676.515.000	-1.005.663.020	6.670.851.980
	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
	Aset Tetap Lainnya	127.598.485	0	127.598.485
	Jumlah	12.860.359.662	-5.252.347.290	8.292.109.345

Aset Lainnya:
Rp359.713.637

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp359.713.637 dan Rp121.003.000. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Tabel 4 Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018
1	Aset tak Berwujud	121.003.000	121.003.000
2	Aset Lain-lain	238.710.637	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	359.713.637	121.003.000
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(359.713.637)	(121.003.000)
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.4.1. Aset tak berwujud

Aset tak
Berwujud :
Rp121.003.000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp121.003.000 dan Rp121.003.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Software	121.003.000
	Jumlah Total	121.003.000

Tidak terdapat perubahan nilai Aset Tak Berwujud baik mutasi tambah maupun mutasi keluar selama Tahun Anggaran 2019 bahkan selama Tahun Anggaran yang lalu. Saldo Aset Tak Berwujud senilai Rp121.003.000 merupakan software yang terpasang pada kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

C.21. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp238.710.637

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp238.710.637 dan Rp.0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada

dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Tinggi Agama Mataram serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2018	0
Mutasi Tambah – penghentian penggunaan aset tetap	238.710.637
Mutasi Kurang – penghapusan	0
Saldo per 31 Desember 2019	238.710.637

Penambahan nilai Aset Lain-lain berasal dari penghentian penggunaan aset tetap berupa peralatan dan mesin karena berada dalam kondisi rusak berat. Adapun rincian Peralatan mesin yang dimaksud dapat dilihat pada data pendukung Laporan Keuangan ini.

C.22. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap :
Rp359.713.637*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp359.713.637 dan Rp121.003.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1	Aset tak Berwujud	121.003.000	121.003.000	0
2	Aset Lain-lain	238.710.637	238.710.637	0
	Total	359.713.637	359.713.637	0

C.14. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada
Pihak Ketiga:
Rp 17.478.357*

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp17.478.357 dan Rp20.188.037. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu

kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2018
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	2.202.014	1.929.456
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	15.276.343	18.258.581
Total	17.478.357	20.188.037

C.15. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN:
Rp4.027.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.4.027.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.14. Pendapatan Diterima Dimuka

*Pendapatan
diterima di
muka:
Rp.871.667*

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp871.667 dan Rp1.917.667. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2018
Pendapatan Sewa Diterima di muka	871.667	1.917.667
Total	871.667	1.917.667

Pendapatan diterima di muka berasal dari Pendapatan sewa kantin yang didirikan di kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram oleh Koperasi Nurul Hijriyah sejak November 2018.

C.15. Ekuitas

Ekuitas:
Rp
46.091.870.011

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp46.091.870.011 dan Rp46.900.232.791. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP:*
Rp7.728.302

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp7.728.302 dan Rp17.038.585. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(turun)%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.728.302	10.868.305	-28,89
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	6.170.280	-100,00
Total Pendapatan		7.728.302	17.038.585	-54,64

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
: Rp
12.286.399.370

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp12.286.399.370 dan Rp17.915.639.760. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(turun)%
1.	Beban Gaji	3.175.480.920	3.669.456.480	-13,46
2.	Beban Tunjangan-tunjangan	9.110.918.450	14.246.183.280	-36,05
3.	Beban Honorarium dan Vakansi	0,00
4.	Beban Lembur	0,00
Total		12.286.399.370	17.915.639.760	-31,42

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp56.429.500*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp56.429.500 dan Rp55.757.750. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(turun)%
1.	Beban Persediaan Konsumsi	56.429.500	55.757.750	1,20
2.	Beban Persediaan Strategis untuk Berjaga-jaga
3.	Beban Persediaan Lainnya
Total		56.429.500	55.759.768	1,20

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp
1.416.101.626*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.416.101.626 dan Rp864.620.130. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Barang Operasional	760.643.925	675.698.622	12,57
Beban Langganan Daya dan Jasa	136.829.633	128.044.066	6,86
Beban Jasa Pos dan Giro	23.158.068	15.882.500	45,81
Beban Baran Non Operasional	10.800.000	44.994.942	-76,00
Beban Jasa Lainnya	484.670.000	0	0,00
Total Beban Jasa	1.416.101.626	864.620.130	63,78

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp652.416.050*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp652.416.050 dan Rp697.642.068. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	298.643.263	332.212.757	-10,10
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	351.046.137	356.942.311	-1,65
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	2.726.650	8.487.000	-67,87
Total Beban Pemeliharaan	652.416.050	697.642.068	-6,48

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp
643.991.755*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp643.991.755 dan Rp605.312.757. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	581.811.755	543.362.757	7,08
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	6.680.000	3.450.000	93,62
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	55.500.000	58.500.000	-5,13
Total Beban Perjalanan Dinas	643.991.755	605.312.757	6,39

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk

barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp 927.075.867

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp927.075.867 dan Rp709.397.288. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	330.484.114	299.265.974	10,43
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	596.591.753	410.131.314	45,46
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah Penyusutan	927.075.867	709.397.288	30,69
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	927.075.867	709.397.288	30,69

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp6.150*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus/ Defisit dari Kegiatan non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	2.100.000	0,00
Penjualan Alat Angkut Darat	0	2.100.000	0,00
Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	6.150	121.000	-94,92
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	6.000	121.000	-95,04
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	150	0	0,00
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	6.150	2.221.000	-99,72

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp46.900.232.791 dan Rp13.491.507.612.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp(15.974.679.716) dan Rp(20.829.110.168). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-76.107.000 dan Rp33.946.438.512. Revaluasi Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada Laporan Keuangan.

E.3.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.268.257 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp15.238.155.679 dan Rp20.291.396.835.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-6.682.452
Ditagikan ke Entitas Lain	15.160.782.531
Transfer Masuk	84.055.600
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	15.238.155.679

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp6.682.452 sedangkan DKEL sebesar Rp15.160.782.531.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/ Transfer Keluar merupakan perpindahan asset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp84.055.600, sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0. Pengadilan Tinggi Agama Mataram menerima transfer masuk berupa PC dan UPS dari Mahkamah Agung.

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima sepanjang Tahun 2019.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	
2	ABC	Barang	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2019 disajikan pada lampiran.

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp46.091.870.011 dan Rp46.900.232.791.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK baik untuk Tahun Anggaran 2019 maupun Tahun Anggaran yang lalu, sehingga tidak ada informasi yang layak untuk ditampilkan pada bagian Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan diterima di muka atas sewa kantin. Sewa dibayarkan pada bulan November 2018 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sehingga sampai dengan 31 Desember 2019 tersisa 10 (sepuluh) bulan yang masih diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka.
2. Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar berupa Kekurangan Gaji atas kenaikan pangkat. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar berupa tagihan langganan listrik, telepon, dan pos untuk pemakaian bulan Desember 2019.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah:

1. BRI Cabang Mataram A/C 0052-01-000096-30-1 a.n. BPG 038 PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.0.
2. BRI Cabang Mataram A/C 0052-01-001040-30-3 a.n. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.0.

3. Bank BRI Cabang Mataram A/C 0052-01-001217-30-8 a.n. RPL 038 PTA Mataram Utk PDT Bya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.922.129.

F.2.4. Revisi DIPA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram selama Tahun Anggaran 2019 total melakukan 10 (sepuluh) kali revisi DIPA. Diantaranya yaitu 4 (empat) kali revisi yang mengubah Total Pagu yaitu pada:

1. revisi ke-3 tanggal 29 Mei 2019,
2. revisi ke-6 tanggal 17 Oktober 2019,
3. revisi ke-7 tanggal 6 November 2019, dan
4. revisi ke-10 tanggal 23 Desember 2019.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Selama Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Tinggi Agama Mataram hanya melakukan 2 (dua) kali koreksi SPM yaitu untuk SPM Nomor 93 dan 106. Adapun kesalahan SPM tersebut yaitu kesalahan kode akun dan kode komponen untuk Belanja Perjalanan dinas dan Belanja Barang Operasional.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak terdapat informasi lain yang layak untuk dituangkan pada Laporan Keuangan Tahunan 2019 ini.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
 untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2018	2018	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2019
A.	Peralatan dan Mesin		4.979.958.977	3.930.324.819	299.265.974	-74.680.000	825.048.184
1	Alat Bantu	7	393.240.000	140.442.857	56.177.143	0	196.620.000
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	1.714.609.412	1.698.289.412	36.400.000	-74.680.000	54.600.000
3	Alat Ukur	5	625.000	625.000	0	0	0
4	Alat Kantor	5	530.767.925	403.913.842	31.088.586	0	95.765.497
5	Alat Rumah Tangga	5	1.313.099.328	1.024.724.420	85.616.092	0	202.758.816
6	Alat Studio	5	78.510.000	59.777.000	4.202.000	0	14.531.000
7	Alat Komunikasi	5	36.255.000	12.384.979	6.820.009	0	17.050.012
8	Komputer Unit	4	702.806.957	462.945.927	56.924.580	0	182.936.450
9	Peralatan Komputer	4	210.045.355	127.221.382	22.037.564	0	60.786.409
B.	Gedung dan Bangunan		7.752.622.000	2.102.649.995	410.131.314	-2.099.441.785	7.339.282.476
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	6.363.272.000	1.806.961.945	366.192.458	-1.803.753.735	5.993.871.332

2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	1.213.852.000	290.322.610	39.658.416	-290.322.610	1.174.193.584
3	Tugu/tanda Batas	50	175.498.000	5.365.440	4.280.440	-5.365.440	171.217.560
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya		127.778.685	0	0	0	127.778.685
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	127.598.485	0	0	0	127.598.485
2	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	-	0	0	0	-	0
3	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	-	180.200	0	0	0	180.200
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		0	293.957.126	0	-293.957.126	0
1	Alat Kantor	5	0	18.874.126	0	-18.874.126	0
2	Alat Rumah Tangga	5	0	133.595.000	0	-133.595.000	0
3	Alat Studio	5	0	14.880.000	0	-14.880.000	0
4	Alat Komunikasi	5	0	14.753.000	0	-14.753.000	0
5	Komputer Unit	4	0	50.249.500	0	-50.249.500	0
6	Peralatan Komputer	4	0	61.605.500	0	-61.605.500	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		12.732.580.977	6.326.931.940	709.397.288	-2.468.078.911	8.164.330.660
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		12.860.359.662	6.326.931.940	709.397.288	-2.468.078.911	8.292.109.345

B. Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
		U				Nilai	Keterangan
	NIHIL		NIHIL				
	Jumlah :						

C. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

**RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019**

NO	URAIAN	LOKASI	NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK	PERSentase Pengerjaan	NILAI PEKERJAAN	KETERANGAN
	NIHIL						